

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai kota tujuan bagi orang-orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. DKI Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Hal ini menyebabkan warga Jakarta terkadang mengalami eskalasi penduduknya. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat selalu selaras dengan lingkungan. Ada hubungan yang erat antara manusia dan lingkungan. Secara ekologis, manusia merupakan bagian integral dari lingkungannya. Manusia membentuk lingkungannya dan sebaliknya, manusia membentuk lingkungannya. Kelangsungan hidupnya hanya mungkin dalam kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Jakarta merupakan daerah padat penduduk di Indonesia dan setiap hari menghasilkan banyak sampah. Meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk secara signifikan dan pola konsumsi masyarakat secara tidak langsung menambah volume, jenis, dan karakteristik sampah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume sampah yang terangkut di DKI Jakarta mencapai 7.233.82 ton per hari pada 2021. Semua sampah langsung dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

Sampah dipandang sebagai benda yang harus dibuang. Sampah merupakan isu penting terutama di perkotaan yang jumlah penduduknya cukup besar dan relatif padat di perkotaan. Kehidupan manusia dengan segala fungsinya tidak lepas dari

sampah yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan manusia berupa kegiatan rumah tangga dan industri. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk di suatu tempat pasti akan bertambah dan beririsan dengan pertumbuhan industri juga cukup pesat. Sehingga akan menghasilkan berbagai jenis sampah dari kehidupan tersebut. Namun sayangnya, kegiatan yang dihasilkan bertendensi dikontribusikan oleh perilaku immoral. Perilaku ini bermuara dari tidak pedulinya mereka terhadap hasil dari kegiatannya yaitu terhadap lingkungan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 pada laporan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) Indonesia tahun di tahun 2018 yang memuat kisaran dari 0 hingga 1. Nilai IPKLH yang semakin besar (mendekati 1) menunjukkan semakin tingginya tingkat ketidakpedulian lingkungan di wilayah tersebut sedangkan semakin kecil nilai IPKLH (mendekati 0) menunjukkan semakin rendah tingkat ketidakpedulian lingkungan di wilayah tersebut. Provinsi DKI Jakarta memiliki IPKLH 0.51 dari indikator 1 pada tahun 2017 dari data tersebut menunjukkan bahwa perilaku ketidakpedulian di Kota Jakarta masih relatif tinggi. Lalu perilaku ketidakpedulian manusia akan mengakibatkan sifat yang sembrono, egois, dan tidak bertanggung jawab dalam eksploitasi lingkungan, termasuk seringnya mengabaikan manfaat perlindungan lingkungan dalam pengambilan keputusan dan kerusakan moral.

Akhlik yang buruk menyebabkan kondisi lingkungan semakin kritis dan merugikan masyarakat itu sendiri. Akibat pola pikir seperti ini, masyarakat akhirnya menghasilkan banyak sampah, tetapi tidak mengerti bagaimana cara mengatasinya.

Namun, permasalahan ini akan memiliki dampak yang bertahan lama di masa depan. Bukan hanya hari ini, tapi besok dan seterusnya. Masalah sampah berbahaya, termasuk pencemaran air, udara dan tanah yang merugikan lingkungan dan tempat tinggal manusia. Limbah dari aktivitas manusia, hewan, dan alam menghasilkan timbulan sampah di tempat penampungan sementara atau tempat pembuangan sampah akhir. Produksi sampah yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan berbagai aktivitas di wilayah yang semakin terbatas merupakan masalah yang dihadapi sebagian besar kota besar. Sehingga kita memerlukan sesuatu untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengelolanya.

Pentingnya pengelolaan termasuk pemilahan sampah, agar masyarakat dapat memilah sampah yang tidak benar-benar digunakan dan dapat didaur ulang, sehingga dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA setiap harinya. Peningkatan sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang berwawasan lingkungan akan mengakibatkan kerusakan dan pencemaran. Masalah lingkungan menjadi hal yang penting untuk dihadapi, hal ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat atau penduduk setempat baik yang berasal dari luar maupun dari masyarakat itu sendiri. Dengan pengelolaan sampah yang tepat dapat menjaga kesehatan, kebersihan dan keramahan lingkungan. Pengelolaan bisa dilakukan secara vertikal dan horizontal. Langkah vertikal bisa melalui peraturan pemerintah untuk menjadi landasan hukum yang jelas.

DKI Jakarta memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Peraturan ini tertuang pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan isi yang berorientasi pada 5 aspek yaitu aspek dasar hukum, teknis operasional pembiayaan, organisasi, manajemen, dan partisipasi masyarakat. Pada umumnya kebijakan Perda ini bertujuan dan membawa manfaat yang besar untuk kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Karena berangkat dari pengelolaan sampah yang baik dan benar dapat mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. Hal tersebut bisa terwujud dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan.

Kelima aspek tersebut terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu. Maka diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Namun dalam kelima aspek Perda DKI No. 3 2013 ada tiga aspek yang sangat vital untuk perwujudannya yaitu aspek organisasi, manajemen dan partisipasi masyarakat.

Salah satu aktor yang terlibat dalam sebuah permasalahan dalam pengelolaan sampah ini adalah NGO lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Dalam bidang pengelolaan sampah, Walhi melakukan peran dalam programnya untuk mengurangi sampah di DKI Jakarta. Adapun peran yang dilakukan adalah memberikan pengetahuan, advokasi, dan pemahaman terhadap

sampah. Dengan menerapkan program yang dilakukan untuk pengelolaan sampah di Jakarta tujuannya untuk memberikan manfaat dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

Walhi sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) lingkungan berusaha menanggulangi masalah sampah serta mengurangi volume sampah di Jakarta. Dengan perannya yang berbentuk program dan memberikan manfaat dalam beberapa aspek. Berdasarkan dari penjelasan tersebut peneliti akan menitik beratkan penelitian pada Peran WALHI dalam pengelolaan sampah yang ada di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tebet, Jakarta Selatan.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tebet menjadi salah satu fasilitas yang diharapkan bisa menjadi percontohan bagi TPS lainnya. Konsepnya yang matang dalam menyediakan TPS yang berdekatan dengan masyarakat, juga diimbangi dengan taman bermain yang ramah masyarakat. Penelitian ini fokus kepada Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tebet karena menjadi TPS yang beroperasi di sekitar Jakarta dan menjadi wadah penyambung antar sampah masyarakat ke TPA Bantar Gebang. Selain itu, TPS ini menjadi langkah awal yang nantinya akan ada TPS lain di beberapa wilayah dengan konsep yang sama. Sehingga percobaan ini akan membuat pemerintah menemukan banyak celah agar nantinya bisa menciptakan TPS yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prosedur pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Namun sayangnya, keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tebet tersebut membuat masyarakat harus beradaptasi secara tiba-tiba karena dampaknya yang mengganggu secara langsung seperti bau dan kebisingan dalam proses pengerjaannya. Selain itu, selama proses pengolahannya terdapat beberapa masalah diantaranya kasus insinerator. Penggunaan insinerator berlawanan dengan tujuan pengelolaan sampah untuk melindungi kesehatan dan lingkungan. Insinerator membuang emisi berupa dioksin, senyawa yang dikenal paling beracun. Pencemaran dioksin dapat menimbulkan penyakit kanker, permasalahan reproduksi dan perkembangan, kerusakan pada sistem imun dan mengganggu hormon. Merkuri dan partikel halus adalah senyawa lainnya yang dibuang oleh insinerator ke udara. Paparan merkuri dapat berdampak buruk pada sistem saraf dan perkembangan otak anak. Partikel halus dapat menyebabkan terjadinya penurunan fungsi paru, kanker, serangan jantung, dan kematian dini. Sehingga Walhi melakukan Aksi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kasus insinerator dan edukasi terkait dampak yang di timbulkan oleh proyek insenerator di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tebet. Berdasarkan kasus diatas maka peneliti tertarik untuk memperdalam Peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam pengelolaan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tebet, Jakarta Selatan.

## **B. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang, maka peneliti membatasi permasalahan pada Peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam pengelolaan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tebet, Jakarta Selatan.

### C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembatasan masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Peran yang dilakukan Walhi dalam pengelolaan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tebet, Jakarta Selatan ?
2. Mengapa Walhi memilih untuk melakukan *Countervailing* (Penyeimbang) dalam pengelolaan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tebet, Jakarta Selatan ?

### D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara akademis dan pemahaman mengenai Peran NGO, Khususnya NGO lingkungan seperti WALHI dalam pengelolaan sampah di Jakarta sehingga dapat menjadi rujukan lagi bagi penelitian terkait selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi pemahaman dan pemikiran yang disajikan kepada masyarakat atau pembaca yang membaca penelitian skripsi ini mengenai lingkungan di Jakarta, Khususnya menjadi rujukan bagi pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun individu dalam menjaga lingkungan salah satunya dengan melakukan pengelolaan sampah.